

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dapat disebut proses membangun masyarakat Indonesia yang bertujuan sebagai aktualisasi dari masyarakat yang adil dan makmur dapat berupa materiil maupun spiritual yang tertuang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan dilakukan diberbagai aspek kehidupan demi pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas masyarakat. Demi tercapainya tujuan tersebut maka pembangunan nasional harus mencakup segala aspek kehidupan bangsa yang diselenggarakan bersama baik dari masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat juga berperan dan berkewajiban dalam pembangunan dengan cara membuat suatu inovasi dalam membangun khususnya pada bidang perekonomian selanjutnya pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang, saling mengisi serta saling melengkapi.

Dalam pelaksanaanya masyarakat masih belum dapat berperan sebagai subjek dalam pembangunan. Menjadikan rakyat sebagai subjek pembangunan adalah memberikan hak-haknya untuk berpartisipasi dalam pembentukan dan pembangunan produksi nasional. Untuk sampai pada tujuan tersebut, rakyat perlu dibekali modal materiil dan mental. Hal ini juga telah menginspirasi pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat yang kemudian berkembang menjadi isu untuk membangun sistem perekonomian yang berlandaskan kerakyatan. Berdasarkan

masalah perekonomian rakyat merupakan tantangan yang berat dan perlu dikelola untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu menjadi bangsa yang terlindungi, sejahtera, cerdas dan bersolidaritas tinggi. Cita-cita bangsa Indonesia yang tersirat tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 4 "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".(Undang-undang dasar 1945, n.d.)

Kedudukan umkm dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya yang banyak, melainkan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja. Di samping itu umkm juga memiliki potensi penghasil devisa yang cukup besar melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Secara umum umkm memiliki kedudukan yang sangat potensial dalam perekonomian nasional, namun kenyataannya masih banyak masalah yang menghadang dalam pengembangan umkm tersebut.(Syarifuddin M. Adam & Rumawas, 2016)

Berdasarkan hasil penelitian Syarifuddin dkk menunjukkan bahwa keberadaan umkm mempunyai tanggung jawab yang sifatnya konseptual tersebut perlu diwujudkan, salah satu caranya adalah dengan adanya kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan oleh pemerintah dengan instansi-instansinya di bidang pemberdayaan UMKM. Dalam konsep perekonomian nasional banyak usaha yang tumbuh secara alami yang dikenal dengan UMKM. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat ini merupakan bagian terbesar dari kegiatan ekonomi yang

dilakukan rakyat Indonesia. Kegiatan UMKM terbukti mampu bertahan saat krisis tahun 1998. Daya tahan ini tercipta karena kemampuan usaha ini untuk mengembangkan sistem ekonominya sendiri yang dikenal dengan perekonomian rakyat yang didukung sistem keuangan yang baik dari sumber maupun model pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh rakyat. Serta UMKM juga mampu menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa. Maka dari itu perlu adanya pemberdayaan, pemberdayaan UMKM bukan hanya dalam meningkatkan dan mempercepat pembangunan usaha itu sendiri tetapi dalam pelaksanaannya juga harus mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan ekspor hasil industri sehingga tercipta struktur ekonomi yang seimbang. Tumbuhnya usaha mikro dapat dijadikan sebagai tolak ukur pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM juga punya peran strategis dalam upaya pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembinaan usaha ekonomi terhadap Koperasi dan Usaha Mikro sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ikut memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dalam mewujudkan Koperasi, Usaha Mikro dan sentral ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri. Berdasarkan hasil penelitian dari Dwi Sepriyono Nur menunjukkan bahwa pertumbuhan iklim usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dalam rangka menumbuhkan jumlah UKM di Kota Samarinda dengan memberikan kemudahan perijinan serta dukungan serta regulasi yang kuat agar UKM dapat berdaya saing dan mampu tumbuh berkembang, pertumbuhan unit-unit usaha baru yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM yaitu melakukan

kegiatan Temu UKM dalam upaya peningkatan jumlah pelaku UKM di Kota Samarinda. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM meliputi kegiatan peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan serta pemasaran produk UKM di Kota Samarinda.(Nur, 2017)

Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan kontribusi UMKM dalam meningkatkan perekonomian yang positif di Indonesia sangat penting maka setiap Kota harus memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota masing-masing, termasuk Kota Batam. Perkembangan usaha mikro Kota Batam dapat dilihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kota Batam tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun	
	2016 (%)	2017(%)
Jumlah Pelaku Usaha	1131(3.77)	1297(4.32)

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perkembangan jumlah pelaku usaha mikro yang berperan dalam pembangunan Kota Batam dengan sangat baik dan produktif. Hal ini terlihat dari jumlah kenaikan para pelaku UKM tersebut. Jumlah pelaku usaha mikro dari tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan yaitu 3.77% pada tahun 2016 dan 4,32 pada tahun 2017. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UMKM Batam sudah mencapai angka 75.757 lebih usaha. Sekitar 74 ribu UMKM belum mendapatkan pembinaan dari Dinas

KUM. Bahkan dari 1.138 UMKM yang dibina oleh Dinas KUM hanya 336 yang tercatat mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). (Pos, 2018)

Hal ini justru bertolak belakang dengan semangat berwirausaha masyarakat kota Batam yang ditandai dengan pertumbuhan UMKM yang bertambah banyak. Sejak tahun 2001 hingga 2017 pengguna manfaat dana bergulir yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Batam mencapai 2.105 dengan total penyaluran mencapai Rp 77,432 miliar. Namun hanya 1138 pelaku UKM yang berada dalam pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Pelaku usaha mikro dengan aset maksimum Rp 50 juta dan omzet Rp 300 juta setahun dan pelaku usaha tercatat aktif tahun hingga tahun 2017 yang mendapat Namun di tahun 2018, pelaku usaha harus registrasi ulang untuk mengetahui status usaha apakah aktif atau tidak. Dalam melakukan pembinaan, pihak Dinas memotivasi pelaku UMKM memasarkan produknya secara online sesuai dengan target pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Pada halaman berikutnya terdapat Data Rekapitulasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan di Kota Batam.

Tabel 1. 2 Data Rekapitulasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan di Kota Batam

No.	KECAMATAN	PELAKU USAHA MIKRO			JUMLAH IUMK YANG DIBERIKAN						PERSENTASE USAHA MIKRO THD DATA BPS (UMK = 75.575)
		TERDAFTAR S.D TAHUN 2016	S.D 2017	S.D 2018	DAGANG/ RESELLER	MAKANAN/ MINUMAN	KERAJINAN	JASA	KOSMETIK/ OBAT-OBATAN	TOTAL IUMK S.D 2017	
1	NONGSA	156	3	4	1	1	2	1	0	5	5.29276E-05
2	SAGULUNG	597	29	63	61	55	15	9	1	141	0.000833609
3	BATU AJI	469	34	39	16	28	4	6	0	54	0.000516044
4	LUBUK BAJA	149	12	15	9	4	1	1	0	15	0.000198478
5	SEKUPANG	238	28	35	2	19	12	2	0	35	0.000463116
6	SEI. BEDUK	112	14	19	2	16	1	1	0	20	0.000251406
7	BENKONG	99	16	22	0	11	1	2	0	14	0.000291102
8	BATAM KOTA	239	24	34	0	21	2	0	0	23	0.000449884
9	BATU AMPAR	53	0	4	0	0	0	0	0	0	5.29276E-05
10	GALANG	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	BULANG	19	6	7	0	29	0	0	0	29	9.26232E-05
12	BELAKANG PADANG	51	2	3	0	0	0	0	0	0	3.96957E-05
TOTAL		2217	165	245	91	184	38	22	1	336	0.003241813

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang memiliki izin usaha sebanyak 336 usaha mikro dengan presentase usaha mikro 0.007198148 yang terdiri dari usaha bidang perdagangan sebanyak 91, usaha bidang makanan sebanyak 184, usaha bidang kerajinan sebanyak 38, usaha bidang jasa sebanyak 22 dan usaha bidang kosmetik atau obat-obatan sebanyak 1 usaha. Sagulung merupakan kecamatan yang mengisi seluruh bidang usaha mikro yang terdiri dari dagang, makanan/minuman, kerajinan, Jasa, dan Kosmetik/Obat-obatan. Kecamatan Batu Ampar, Galang dan Belakang Padang pelaku usaha tidak memiliki izin usaha. Dari penjelasan tersebut maka Penulis tertarik melakukan penelitian di Kecamatan Sagulung karena kecamatan Sagulung merupakan kecamatan yang seluruh bidang usaha dalam usaha mikro terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis paparkan maka penulis ingin melakukan penelitian dan menganalisis bagaimana kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dengan UMKM sebanyak 75.575 namun yang mendapatkan pembinaan hanya sebanyak 1.138 UMKM dan hanya sebanyak 336 yang mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Maka dari itu penulis berinisiatif dan sangat tertarik mengambil judul: “Analisis Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam memberdayakan UMKM di Kota Batam.”.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana implemetasi program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, menganalisa Kinerja dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memberdayakan Usaha Mikro di Kota Batam, dan menganalisis

faktor-faktor penghambat implementasi program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, masalah yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam?
2. Bagaimana kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam memberdayakan Usaha Mikro di Kota Batam?
3. Faktor apa saja yang menghambat implementasi program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.
2. Menganalisis Kinerja dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam memberdayakan Usaha Mikro di Kota Batam.
3. Menganalisis faktor-faktor menghambat implementasi program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diuraikan bahwa manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini di bedakan menjadi dua yaitu manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis:

1.4.1 Secara Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian dalam:

1. Pemahaman teori tentang kinerja dalam Teori Administrasi Publik.
2. Pemahaman teori Implementasi Program dalam Teori Administrasi Publik.
3. Pemahaman konsep tentang Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro khususnya di Kota Batam.
4. Pemahaman tentang faktor-faktor penghambat Kinerja dalam pemberdayaan usaha mikro di Kota Batam.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Objek Penelitian
 - a. Sebagai masukan kepada pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk memperbaiki pelayanan terhadap pembinaan Usaha Mikro di Kota Batam.
 - b. Data atau informasi sebagai dasar pengambilan keputusan untuk Dinas Koperasi agar meratakan pelayanan .
2. Bagi Universitas Putera Batam

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya. Hasil ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan tentang pemberdayaan usaha mikro.